



Pemikiran tentang Kota Allah dan Kota Dunia: Analisis Kritis terhadap Demokrasi dan Kapitalisme serta Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Indonesia

Oliverensius Ngatamri^{1*}, Fransiskus Erick Saputra Pantur², Fransiskus Sandriano³

¹⁻³Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Email: erenswerang409@gmail.com¹, Panturerick174@gmail.com²,

sandryfransiskus@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: erenswerang409@gmail.com

Abstract. *The book on the City of God and the City of Man is a masterpiece by St. Augustine that is very influential in the history of philosophy and theology. This book contains the background of Augustine's philosophical and theological reflections on the accusation of the destruction of the Roman Empire against Christianity. The City of God described in Augustine's perspective is a city that prioritizes love for God. While the City of Man is a city that reflects self-love. The implications of both types of cities in Augustine's perspective are very relevant to be discussed in the discourse on the concept of statehood. This paper also aims to analyze the relationship between democracy and capitalism in the perspective of Augustine of Hippo's thought, especially through the concept of civitas Dei (City of God) and civitas terrena (World City). This study uses a qualitative method with a library research approach. The results of this study show that democracy and capitalism, although providing space for freedom, are vulnerable to deviations when not guided by the correct moral orientation. In light of Augustine's thought, the crisis in modern democracy such as; Money politics, media manipulation, and anarchic demonstrations reflect the dominance of self-love (amor sui) that characterizes the civitas terrena. Therefore, democracy can only operate fairly if it is rooted in moral values that lead to the common good (Bonum communa).*

Keywords: *Augustine; Capitalism; Civitas Dei; Civitas Terrena; Democracy.*

Abstrak. Buku tentang Kota Allah dan Kota Manusia adalah maha karya St. Agustinus yang sangat berpengaruh dalam bentangan sejarah filsafat dan teologi. Buku ini berisikan tentang latar belakang refleksi filosofis dan teologis Agustinus mengenai tuduhan kehancuran kekaisaran Romawi terhadap Kekristenan. Kota Allah yang digambarkan dalam perspektif Agustinus adalah kota yang mengedepankan cinta terhadap Tuhan. Sedangkan Kota Manusia adalah kota yang mencerminkan cinta diri. Implikasi dari kedua jenis kota dalam perspektif Agustinus sangat relevan untuk dibahas dalam bentangan diskursus tentang konsep kenegaraan. Tulisan ini pun bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan kapitalisme dalam perspektif pemikiran Agustinus dari Hippo, khususnya melalui konsep civitas Dei (Kota Allah) dan civitas terrena (Kota Dunia). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa demokrasi dan kapitalisme, meskipun memberikan ruang kebebasan, rentan terhadap penyimpangan ketika tidak diarahkan oleh orientasi moral yang benar. Dalam terang pemikiran Agustinus, krisis dalam demokrasi modern seperti; politik uang, manipulasi media, dan demonstrasi anarkis, mencerminkan dominasi cinta diri (*amor sui*) yang menjadi ciri civitas terrena. Oleh karena itu, demokrasi hanya dapat berjalan secara adil apabila berakar pada nilai moral yang mengarah pada kebaikan bersama (*Bonum communa*).

Kata Kunci: Agustinus; Civitas Dei; Civitas Terrena; Demokrasi; Kapitalisme.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan kapitalisme merupakan dua sistem yang memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi menekankan kebebasan politik dan partisipasi rakyat sedangkan kapitalisme menekankan kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi. Dalam praktiknya, kedua sistem ini berjalan beriringan dan saling menopang. Salah satu negara yang menganut sistem demokrasi juga menganut sistem kapitalisme ialah Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut kebijakan pasar besar. Kebijakan ini sendiri

membuka peluang bagi setiap orang untuk berkompetisi dalam perekonomian. Namun kebijakan ini tidak selamanya menghasilkan kesejahteraan tetapi juga ketimpangan pendapatan yang cukup besar. Hal ini menjadi dasar diskursus banyak pemikir terkait relevansi antara kapitalisme dan demokrasi. Banyak pemikir yang mengutarakan pendapat dalam melihat dan menelaah kaitan keduanya baik dalam bentuk afirmatif maupun oposisi. Adam Smith sebagai peletak dasar teori kapitalisme mengemukakan bahwa kapitalisme yang berisikan kepemilikan dan kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa (Jebadu, 2020: 163). Kapitalisme menurut Adam Smith dipandang sebagai sistem yang urgen dalam ekonomi sekarang ini karena dapat memacu kesejahteraan bagi setiap individu.

Di sisi lain perbincangan terkait kapitalisme rasanya tidak lengkap tanpa mengaitkannya dengan sistem demokrasi. Dewasa ini demokrasi dan kapitalisme tidak dapat dilepas pisahkan dalam tatanan negara. Demokrasi sebagai acuan politik dan kapitalisme sebagai acuan ekonomi dianggap saling melengkapi. Banyak negara yang dalam praktik politiknya menganut demokrasi dan dalam ekonominya menggunakan sistem kapitalisme.. Relevansi sistem kapitalisme dan demokrasi dalam bentangan sejarah memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan, perdamaian dan kerja sama. Selain itu latar belakang munculnya demokrasi juga dikaitkan dengan sistem kapitalisme. Munculnya demokrasi seperti dalam artikel yang ditulis Francis Fukuyama, menyatakan berakhirnya perang dingin menandakan kemenangan bagi sistem demokrasi liberal yang didukung oleh kapitalisme global. Menurutnya kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas, kompetisi dan kebebasan individu telah melahirkan alas bertumbuh dan bertahannya demokrasi. Kenyataan ini menjadi landasan bagi kemakmuran bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan juga sistem ekonomi kapitalisme (Jegalus, 2011: 10). Namun tidak bisa dimungkiri bahwa demokrasi yang berasaskan kesetaraan acapkali tidak tepat sasaran. Salah satu di antaranya ialah Indonesia. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini terlihat dalam berbagai fenomena seperti politik uang dalam pemilu, manipulasi informasi oleh media, serta demonstrasi yang berujung anarki. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan yang menjadi fondasi demokrasi dan kapitalisme sering kali disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kolektif tertentu.

Ironisnya prinsip demokrasi yaitu asas kebebasan individu dipandang hanya aturan atau formalitas yang digunakan kaum kapitalisme untuk memperoleh legitimasi yuridis untuk menjalankan fungsi produksi dalam negara. Demokrasi yang menganut sistem pasar bebas membuka ruang bagi kaum kapitalis untuk menanamkan modal. Alexander Jebadu

mengemukakan bahwa perang saat ini bukan lagi dalam bentuk genjatan senjata melainkan melalui sistem ekonomi pasar bebas yang didalangi oleh kaum kapitalis dan melalui UU yang diciptakan demokrasi (Jebadu, 2020: III). Kenyataan ini melahirkan sebuah gugatan bahwa kebebasan yang menjadi fondasi utama kedua sistem tersebut sering kali disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Bertolak dari realitas ini, penulis mencoba mengaitkannya dengan paradigma Agustinus dari Hippo. Melalui karya terkenalnya *De civitate Dei* (Kota Allah), Agustinus mengemukakan pemikiran dalam kerangka reflektif filosofis dan teologis tentang dua keterarahan manusia dalam keterlemparan ke dunia. Agustinus mengemukakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari dua orientasi fundamental, yaitu *amor Dei* (cinta kepada Allah) dan *amor sui* (cinta kepada diri sendiri). Kedua keterarahan ini melahirkan dua “kota” yang berbeda, yakni *Civitas Dei* (Kota Allah) dan *Civitas Terrena* (Kota Dunia). Kota Allah ditandai oleh orientasi pada keadilan, kerendahan hati, dan kebaikan bersama, sedangkan Kota Dunia ditandai oleh dominasi kepentingan pribadi, keserakahan, dan pencarian kekuasaan. Kedua keterarahan ini menyebabkan pemisahan, yaitu terbentuknya kota Allah di satu sisi dan kota dunia di sisi lain. Kajian pemikiran Agustinus terkait kedua kota ini, menarik untuk dikaji dalam hubungan dengan kapitalisme dan demokrasi.

Namun perlu digarisbawahi bahwa Agustinus tidak secara langsung menganalisis demokrasi dan kapitalisme dalam pengertian modern. Oleh karena itu, pendekatan dalam tulisan ini bersifat interpretatif, yakni membaca fenomena sosial-politik kontemporer melalui kerangka etika dan teologi politik Agustinus. Dalam perspektif ini, persoalan utama bukan terletak pada sistem politik atau ekonomi itu sendiri, melainkan pada orientasi moral manusia yang menjalankannya.

2. KAJIAN TEORI

Penulis akan menguraikan beberapa sumber relevan yang menjadi basis konseptual dalam proses pengembangan teori yang mendukung penulisan ini.

Pandangan Agustinus tentang Kota Allah dan Kota Manusia

Agustinus dari Hippo mengembangkan dua jenis kota yang termanifestasi dalam bentuk kolegalitas kehidupan manusia yang tidak saling mengeliminasi atau sama seperti kehadiran kaum kaya dan miskin dalam sebuah kelompok masyarakat yang tidak dapat dihilangkan. Dua kota tersebut adalah Kota Allah dan Kota Manusia. Kota Allah secara singkat digambarkan dalam persepektif Agustinus merupakan kota yang dibangun di atas cinta akan Allah (*Love of God*). Ia menempatkan Allah sebagai *sentrum* dalam kehidupan manusia (Rapar, 1989: 61-62). Sehingga Allah juga disebutnya sebagai sumber cinta dan bahkan substansi dari

cinta itu sendiri. Kota Allah akan melahirkan keadilan dan keharmonisan. Sedangkan Kota Manusia menurut Agustinus adalah kota yang dibangun di atas cinta diri (*self-love*) yang berlebihan. Implikasi dari cinta diri ini adalah menjadikan diri sebagai sentrum atau pusat (Rapar, 1989: 62). Cinta diri ini hanya akan melahirkan ketamakan dan kerakusan manusia terhadap kekuasaan.

Demokrasi

Secara harafiah, kata demokrasi berasal dari bahasa Inggris yakni *democracy* berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratein* yang berarti “memerintah.” Berdasarkan arti secara leksikal tersebut, dapat dijelaskan bahwa demokrasi dipahami sebagai kekuasaan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi dipahami sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam suatu negara (Astawa, 2015: 12). Namun dalam bentangan sejarah, arti etimologis demokrasi mengalami perluasan. Perluasan tersebut buka tanpa sebab, tetapi dipengaruhi oleh pandangan modern terhadap demokrasi. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam pengertian Save M. Dagun dalam kamus besar ilmu pengetahuan. Ia mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan negara dan pemerintahan dalam tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini semua warga negara dianggap memiliki daya rasional dan hati nurani yang baik. Hal itu dapat kita lihat dalam praktik negara yang melibatkan warga negara dalam mengambil keputusan untuk memilih pemimpin negara dan orang yang memiliki status dalam struktur pemerintahan (Dagun, 2000: 165).

Kapitalisme

Sistem kapitalisme melihat bahwa manusia merupakan pemilik sentral dalam perihal tentang kepemilikan harta-harta yang telah diusahakan. Artinya bahwa tidak ada campur tangan ganda dalam rasa kepemilikan harta di luar dirinya. Ia memiliki hak absolut dalam mempergunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul bersamaan dengan industri sandang di Inggris pada abad ke-16 (Effendi, 2019: 149). Adam Smith yang dikenal dengan bapak ekonomi, mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang menjadikan pribadi sebagai penentu roda perekonomian. Melalui mekanisme kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif menjadi penentu kemajuan perekonomian. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa, yang seolah-olah, individu didorong dengan “Tangan Tak Terlihat” yang mendorong mereka untuk maju (Hasan dan Mahyudi, 2020: 26).

Penulis juga akan menyajikan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung proses pengembangan teori dalam penulisan ini. Penelitian *pertama*, yang dilakukan oleh Alwino tentang cinta diri menurut Agustinus dan Hobbes. Ia memahami cinta diri dalam konsep Agustinus sebagai kepentingan diri yang berindikasi terhadap perbuatan-perbuatan gelap yang berakar pada cinta diri itu sendiri dan sikap egoistik. Hal ini menjadi bentuk resistensi terhadap konsep kota Allah dalam perspektif Agustinus yang mengutamakan cinta kepada Allah. Ia menjelaskan empat keterarahan cinta manusia menurut Agustinus, yakni; *pertama*, kepada yang melampaui diri sendiri yakni Tuhan. *Kedua*, cinta yang ditujukan kepada diri sendiri. *Ketiga*, cinta kepada yang setingkat dengan diri dan *keempat* cinta kepada yang ada di bawah dirinya. Di antara keempat jenis keterarahan cinta tersebut, yang paling utama adalah cinta kepada yang melampaui diri sendiri yakni kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber cinta. Oleh karena itu, cinta terhadap diri sendiri adalah penyimpangan dari arah utama cinta. Cinta diri menjadi sebab lemahnya tiga arah cinta yang lain (Alwino, 2018: 237).

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Mamahit yakni tentang kota Allah dan kota manusia yang termanifestasi dalam konteks sejarah. Ia membagi sejarah ke dalam tiga rentetan waktu dalam pandangan Agustinus yang menjelaskan keadaan akhir sejarah dunia, yakni; *pertama* masa sebelum hukum (masa anak-anak), *kedua* masa di bawah hukum (dewasa) dan *ketiga* masa anugerah atau masa sesudah hukum (masa tua). Pembagaian ini menunjukkan proses perkembangan sejarah. Ia menjelaskan bahwa saat ini gereja sedang berada pada fase yang ketiga yakni fase anugerah ketika anugerah itu sendiri datang dalam diri Yesus Kristus. Namun setelah itu, akan ada saatnya di mana segalanya akan berakhir. Kota manusia akan berakhir dan kota Allah akan tetap bertahan dan akan masuk ke dalam kekekalan. Namun, pandangan ini sebetulnya bertentangan dengan mitos “*Roma Aeterna*” kekekalan kekaisaran Romawi, khususnya kota Roma. Mereka percaya bahwa kota Roma akan dipimpin oleh seorang yang dijadikan sebagai Tuhan dan Allah (*Dominus et Deus*), maka tidak akan dapat binasa. Namun bagi Agustinus kejatuhan kota Roma dengan asumsi yang dipengaruhi oleh pandangan dan kepercayaan akan mitos tersebut salah. Kekekalan kekaisaran Roma adalah pandangan yang salah dan keliru, karena kota Roma adalah *Civitate terrena* dan dengan cukup keras dapat juga disebut sebagai *civitate diaboli*, sebuah kota yang telah dikorupsikan oleh dosa asali, hawa nafsu, peperangan, haus kekuasaan dan telah terikat kuat oleh belunggu-belunggu kejahatan (Mahamit, 2000: 166).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian adalah analisis pemikiran Agustinus dari Hippo mengenai kota Allah dan kota manusia dalam hubungannya dengan demokrasi dan kapitalisme. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder, yaitu buku-buku dan kajian ilmiah yang membahas pemikiran filsafat dan teologi Agustinus, serta didukung oleh artikel jurnal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan pemikiran Agustinus secara sistematis serta mengaitkannya dengan sistem demokrasi dan kapitalisme di Indonesia. Selain itu, digunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami dan menafsirkan konsep-konsep kunci seperti kehendak (*liberum arbitrium*) dan keteraturan cinta (*ordo amoris*) dalam hubungannya dengan dimensi moral pada sistem demokrasi dan kapitalisme. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keadaan demokrasi dan kapitalisme di Indonesia dalam perspektif Agustinus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agustinus

Agustinus lahir di Tagaste, Afrika Utara pada 13 November 345 M. Ia merupakan anak dari Patricius seorang beragama kafir dan ibu bernama Monica seorang yang beragama Kristen yang taat dan saleh. Ia dibesarkan dalam moralitas Kristen sejak masa kecil oleh ibunya, sehingga orang sering mengklaim bahwa nama yang diterima oleh Agustinus sejak ia lahir dan dibaptis adalah Aurelius Agustinus, tetapi hal itu belum memiliki bukti yang cukup. Namun, tembok moralitas yang dibangun dalam dirinya sejak kecil oleh ibunya roboh, karena tidak memikat hatinya. Hal itu dikarenakan persoalan konsistensi moralitas dalam kisah perjanjian lama, terkhusus pada peristiwa pembunuhan yang dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi dibenarkan. Kemudian ia mencari ajaran yang lain yang sesuai dengan keinginannya, hingga ia dipertemukan dengan satu aliran dari Persia yang diperkenalkan oleh nabi Mani. Aliran tersebut adalah Manicheisme. Manicheisme mengajarkan tentang dualisme kekuasaan yang saling bersaing dalam kehidupan manusia, yakni kekuasaan terang melawan kekuasaan gelap atau kekuasaan baik melawan kekuasaan jahat. Aliran ini kemudian sangat menggembirakan hatinya, karena persoalan tentang ketidakkonsistenan moralitas dalam perjanjian lama, membuahkan jawaban yang mampu memecahkan persoalan tersebut. Manicheisme yang dianut oleh Agustinus memiliki dua kelas, yaitu; kelas pendengar yang dibuka bagi siapa saja yang

mau mendengar ajaran itu, dan kelas pilihan yang diperuntukan bagi terlibat dalam praktik ajaran Manicheisme yakni pertarikan atau askese yang tidak diperbolehkan makan daging, kawin dan melakukan hubungan seksual bahkan mereka dilarang untuk terlibat dalam usaha untuk mencari makan, karena kebutuhan mereka diperoleh dari kelompok kelas pendengar. Namun, setelah kurang lebih sembilan tahun Agustinus mengikuti aliran tersebut ia mulai merasakan keanehan penganut aliran tersebut yang cenderung bersifar destruktif. Ia melihat kebobrokan moralitas para penganut Manicheisme yang ternyata lebih buruk dari dugaannya semula.

Oleh sebab itu, Agustinus mulai meninggalkan aliran tersebut, dan dalam beberapa waktu lamanya ia menjadi seorang yang skeptis dan pindah ke Roma pada tahun 383 M. Ia menertawakan doktrin Kristen yang mengajarkan tentang Allah Yang Maha Esa dan Allah Yang Maha Tinggi yang telah menjelma menjadi manusia. Lalu ia pindah ke Milano, dan berkenalan dengan filsafat Neo-Platonisme. Ajaran Neo-Platonisme membantu Agustinus untuk dapat lebih akrab dengan Kitab Suci, sehingga ia mulai membaca kitab suci khususnya surat-surat rasul Paulus. Ibunya kemudian memperkenalkan kepadanya seorang uskup yang sangat terkenal yakni, Ambrosius. Sejak saat itu, Agustinus mulai mengikuti kebaktian-kebaktian di Gereja agar dapat menyaksikan secara langsung khotba-khotba Ambrosius itu. Kendatipun demikian, ia tetap tidak berani mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Hingga suatu hari datangnya seorang sahabatnya dan menceritakan tentang kehidupan mebiara. Pada tahun 387 M Agustinus dibaptis oleh uskup Ambrosius di Milano dan pada tahun 391 M ia mulai menikmati kehidupan mebiara, hingga suatu waktu ia dipilih menjadi seorang calon imam untuk membantu uskup Valerius (Rapar, 1989: 55-56).

Pada tahun 396 M ia ditahbiskan menjadi uskup Hippo untuk menggantikan uskup Valerius yang meninggal dunia pada tahun yang sama itu. Ia menjadi pemimpin yang sangat disegani pada masa itu karena lewat ajaran dan kepemimpinannya yang sangat menonjol. Sementara itu, kekaisaran Romawi Barat sedang berada dalam ambang kehancuran. Hal itu disebabkan oleh bangsa bar-bar yang menyerbu keutuhan kekaisaran Romawi yang selama berabad-abad menguasai dunia. Orang-orang Roma yang beragama kafir mempersalahkan Kristen dalam peristiwa itu. Kekristenanlah yang membuat para dewa murka sehingga dewa-dewa itu tak sudi lagi melindungi kota Roma. Atas tuduhan itu, Agustinus menulis buku yang terkenal dengan judul *De Civitate Dei* (*The city of God*/Negara Allah), yang merupakan filsafat sejarah pertama yang paling mengagumkan dan sekaligus merupakan filsafat politik yang telah mempengaruhi Eropa berabad-abad (Rapar, 1989: 56).

Hubungan demokrasi dan kapitalisme

Demokrasi telah menjadi sistem yang sangat fundamen dalam ketatanegaraan. Mengutip kata-kata dari Muthar Hamuddin demokrasi sekarang ini ialah ideologi tunggal yang tak ada tandingan lagi (Habofdin dan Arjul, 2016: 249). Pandangan ini menjadi mungkin karena setelah perang dunia II dan jatuhnya blok timur yang menganut paham komunis, demokrasi telah menjadi sistem yang dianut oleh banyak negara. Demokrasi menjadi sistem yang dipakai banyak negara lantaran demokrasi memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Sistem demokrasi menerapkan kebebasan politik biasanya berjalan seiring dengan kebebasan ekonomi, di mana rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, berinovasi, dan meningkatkan taraf hidupnya. Pada masa itu hingga sekarang demokrasi menjadi pilar utama lantaran pada sistem ini masyarakat memiliki hak yang sama sehingga memungkinkan adanya kebebasan.

Tidak ada kekuatan utama untuk mengontrol setiap kehendak dari masyarakat. Kenyataan ini terjadi karena, acuan dasar demokrasi ialah ada pada rakyat itu sendiri. Pernyataan terkenal yaitu “dari-oleh-untuk rakyat” menjadi patokan dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam hubungannya dengan konsep pemikiran Agustinus tentang kota Allah, sistem demokrasi Indonesia memiliki implikasi yang jelas sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan atau *Bonum communa*. Oleh karen itu, refleksi filosofis dan teologis dari mahakarya Agustinus ini, mesti menjadi landasan terbentuknya negara ideal.

Di sisi lain, demokrasi juga dikaitkan dengan kapitalisme. Demokrasi dipandang sebagai saudara kembar dari kapitalisme di era globalisasi saat ini. Seperti dalam artikel yang ditulis Francis Fukuyama dalam *the end of history* menyatakan bahwa berakhirnya perang dingin menandakan kemenangan bagi sistem demokrasi liberal yang didukung oleh kapitalisme global. Fukuyama mengidentikan keruntuhan tembok Berlin dengan berakhirnya suatu politik-ekonomi komunistis yang pada saat itu dominan di dunia (Jegalus, 2011: 10). Kekalahan blok Timur menandakan lahirnya sistem demokrasi liberal diiringi dengan ekonomi liberal yaitu ekonomi pasar bebas. Menurutnya kapitalisme dengan mekanisme pasar bebas, kompetisi, dan kebebasan individu telah menciptakan fondasi material yang memungkinkan demokrasi tumbuh dan bertahan. Sistem ekonomi ini mendorong efisiensi produksi, inovasi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi di negara-negara demokratis. Kenyataan ini menjadikan sistem kapitalisme dipandang sebagai sistem ekonomi yang paling efisien dalam mendorong kebebasan individu dalam pertumbuhan ekonomi. Adam Smith sebagai peletak utama teori kapitalisme menyatakan bahwa kapitalisme mendorong individu agar sebebas-bebasnya mengatur ekonomi

(Jebadu, 2020: 164). Dalam sistem ini, setiap orang bebas memiliki harta, menjalankan usaha, menentukan harga, dan bersaing di pasar tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Prinsip utamanya adalah bahwa keputusan ekonomi seperti apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan siapa yang membelinya ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh negara. Kebebasan ini membuat orang terdorong untuk bekerja keras, berinovasi, dan mencari keuntungan, karena hasilnya akan mereka nikmati sendiri. Hal ini memungkinkan adanya kesejahteraan dalam roda perekonomian bagi setiap individu tanpa dikontrol oleh pemerintah.

Pernyataan ini menegaskan bahwa demokrasi dan kapitalisme telah menjadi dua kekuatan utama yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini kian penting, tetapi ada juga kritik yang disampaikan pada awal munculnya sistem kapitalisme yang ditandai liberalisme ekonomi klasik. Salah satu pengkritik yaitu Givertz menyatakan liberalisme ekonomi klasik melahirkan sejumlah bentuk tirani baru yang menindas kaum lemah di dalam masyarakat dan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang (Jebadu, 2020: 55). Hal itu memang sangat riil ketika melihat reaksi ketidakpuasan masyarakat atas mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kelompok kapitalis.

Namun tak pelak juga tujuan yang digagas dalam sistem kapitalisme sering kali membawa ambiguitas yaitu penyimpangan pendapatan. Di tengah gejolak sistem kapitalisme terdapat suara yang kian menggema suara dari rakyat yang tak bisa berkompetensi bukan karena kemampuan tetapi karena keadaan. Kapitalisme melahirkan sebuah *gap* antara yang kaya dan yang miskin. Karl Marx dalam kritiknya menyatakan bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang dibuat kaum borjuis untuk mempertahankan status *Guo* sekaligus menambah kekayaan. Keadaan ini melahirkan penyimpangan dalam distribusi kekayaan (Raho, 2019: 163-164). Kritik ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan dari pasar bebas yang pada awalnya untuk mensejahterakan masyarakat tidak terealisasi. Pasar bebas hanya sebagai alat dari sekelompok orang untuk memperkaya diri. Kaum kapitalis tidak lagi mementingkan kesejahteraan rakyat tetapi lebih mementingkan laba bahkan yang lebih mirisnya cara kerja kaum kapitalis cenderung kurang peka terhadap alam yang telah lama memberi kehidupan. Dalam hal ini, mekanisme pasar bebas bertumpu pada rasionalitas untung rugi bukan pada pertanggungjawaban politik. Oleh karena itu, implikasi dari rasionalitas ini merujuk pada persaingan antara yang kuat dan lemah. Yang kuat akan mampu bersaing sedangkan yang lemah akan mudah kalah dalam dunia kompetisinya (Ule, 2011: 171).

Demokrasi dan Kapitalisme di Indonesia

Gagasan mengenai “kota Allah” dan “kota dunia” yang dikemukakan oleh Agustinus dari Hippo dalam mahakaryanya *De Civitate Dei* menawarkan kerangka refleksi filosofis dan

teologis yang mendalam untuk memahami dinamika kehidupan sosial politik. Dalam pandangan Agustinus komunitas yang berorientasi pada kasih kepada Allah dilambangkan “kota Allah”, sedangkan komunitas yang ditandai dengan cinta diri, yang sering kali berujung pada dominasi, kekuasaan yang rakus, dan ambisi duniawi dilambangkan “kota dunia”. Kedua realitas ini hadir secara bersamaan dalam sejarah manusia dan dalam struktur masyarakat (Agustinus, 2003: 14-16).

Dalam konteks negara Indonesia, hubungan antara demokrasi dan kapitalisme hemat penulis, dapat dianalisis melalui dialektika antara dua realitas tersebut. Demokrasi secara ideal mengagaskan nilai-nilai “kota Allah” karena menekankan keadilan, kesetaraan dan partisipasi. Namun, kapitalisme terutama dalam bentuk yang tidak terkendali, selalu mencerminkan “kota dunia” karena orientasinya pada akumulasi keuntungan dan kepentingan individu.

Sejak masa reformasi tahun 1998, negara Indonesia mengalami kemajuan dalam sistem demokrasi. Kebebasan politik meningkat, pemilu berlangsung secara terbuka, dan partisipasi masyarakat semakin luas. Namun kendatipun demikian, perkembangan ini tidak serta merta berjalan mulus, melainkan membawa serta pengaruh kapitalisme yang semakin kuat. Demokrasi Indonesia pasca-reformasi justru berkembang dalam bayang-bayang oligarki (Hadiz, 2005: 45-47). Kekuasaan ekonomi tidak hilang, tetapi bertransformasi dan beradaptasi dalam sistem demokrasi. Dari perspektif “kota dunia,” realitas tersebut menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi dalam politik. Kapitalisme bukan hanya bekerja dalam bidang ekonomi, tetapi juga beroperasi dan memengaruhi proses demokrasi melalui pendaan politik (politik uang), kontrol media dan lobi kebijakan. Sehingga, investasi tambang dan kontrol pasar menjadi hal yang lumrah bagi kaum kapitalis. Dalam situasi tersebut, demokrasi kehilangan substansinya sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dan berubah menjadi instrumen legitimasi bagi kekuatan kapital. Sebaliknya, dalam terang “kota Allah” demokrasi berorientasi pada kebaikan bersama. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi prosedur formal semata, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama (Hadiz, 2005: 46-47).

Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan fakta kesenjangan antara ideal dan praksis. Kapitalisme yang berkembang acap kali memperlebar kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti pemerataan, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Demokrasi yang sehat mesti didasarkan pada etika politik yang kuat. Tanpa landasan moral demokrasi mudah terjerumus ke dalam praktik korupsi, manipulas dan penyalahgunaan kekuasaan (Suseno, 1999: 56-60). Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya sabuk pengaman demokrasi yang berujung pada disitegrasi

dan anarki. Kenyataan ini juga menghadirkan sikap pesimis kita terhadap sistem demokrasi yang dibaluti oleh kehadiran kelompok kapital yang menyebabkan perusahaan-perusahaan pertambangan transnasional berkeliaran bebas tanpa batas di desa-desa di seluruh pelosok Indonesia, seperti lebah dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam secara membabi buta. Dalam prosesnya, mereka menginjak-injak hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat, menghancurkan lahan-lahan pertanian mereka tanpa menerapkan prinsip persetujuan bebas setelah penjelasan dan tanpa merasa beban terhadap kebijakan mereka yang melanggar Undang-Undang negara (Jebadu, 2020: 127). Hal ini lantaran, ketika kejahatan itu sendiri dirupiahkan melalui legitimasi individual terhadap proses pertambangan dengan meraup keuntungan besar demi kepentingan golongan atau individu. Legitimasi diperhitungkan dengan mata uang yang diberikan untuk memperoleh legal yuridis terhadap kebebasan untuk menanam modal.

Realitas ini memperlihatkan kebobrokan kaum kapitalisme dengan mudah memperburuk kondisi tersebut dengan memperkuat pengaruh uang dalam politik. Akibatnya negara mudah untuk dikontrol oleh kaum kapitalis, yang dengan kerakusanya mengeksploitasi alam menjadi lahan bisnis tanpa memikirkan kepentingan bersama yang diidealkan dalam demokrasi. Oleh karena itu, hubungan antara demokrasi dan kapitalisme di Indonesia merupakan arena pergulatan antara “kota Allah” dan “kota Dunia”. Demokrasi memiliki potensi untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, tetapi realitas yang terjadi demokrasi malah didominasi oleh kapitalisme yang berorientasi pada kepentingan sempit (Jebadu, 2020: 270). Pola pikir yang sudah akrab dengan ketamakan dan kerakusan menjadi cikal bakal lahirnya pemimpin yang tidak ekspert. Sehingga mudah sekali, sistem demokrasi mengalami kehilangan arah dan tujuannya yang ideal yakni tidak mengarah kepada kepentingan yang mesti mengabdikan kepada masyarakat. Aspirasi rakyat tidak didengar di ruang keadilan, tetapi suara mereka hanya diperhitungkan dalam akumulasi pemilu untuk kepentingan struktur pemerintahan.

Pemilu

Sejak Indonesia menganut sistem demokrasi hal yang paling mendasar ialah kekuasaan berada di tangan rakyat. Landasan kode etik kekuasaan pemerintahan “dari rakyat” mengartikan bahwa suara rakyatlah yang menentukan siapa yang berhak menduduki kursi kepemimpinan. Tentunya aspirasi rakyat membutuhkan sebuah wadah dan itu adalah pemilu. Namun alih-alih untuk kesejahteraan masyarakat menggunakan suaranya untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menerima politik uang atau *money politic*. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan potensi yang dimiliki oleh seorang calon

tetapi berdasarkan seberapa besar uang yang ditawarkan (Hamson, 2021: 40). Keadaan ini menjadikan distorsi pada proses pemilu itu. Tujuan pemilu yang awalnya mencari pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab malah menghasilkan pemimpin yang korup. Hal ini dikarenakan budaya *money politic* yang mendarah daging dalam sistem pemilihan umum. Selain itu, pilihan berdasarkan kesamaan status sosial berupa agama, tempat asal, hubungan kekeluargaan seringkali merusak citra pemilu itu sendiri. Identitas disematkan ke dalam ranah politik yang menjidakan ruang politik itu sendiri sebagai ranah persaingan yang tidak sehat.

Dalam terang pemikiran Agustinus dari Hippo, situasi ini mencerminkan dominasi *civitas terrena* (kota dunia), yaitu komunitas yang dibangun atas dasar *amor sui* (cinta diri). Dalam *De Civitate Dei*, ia menegaskan bahwa dua kota terbentuk dari dua cinta: “dua kota telah dibentuk oleh dua cinta: kota dunia oleh cinta diri sampai pada penghinaan terhadap Allah, dan kota Allah oleh cinta kepada Allah sampai pada penghinaan terhadap diri.” Ketika pemilu dikendalikan oleh kepentingan pribadi dan material, maka etika dan tanggung jawab politik tidak lagi mengarah pada kebaikan bersama, melainkan pada kepentingan diri, yang merupakan ciri khas kota dunia. Inilah yang kemudian melahirkan pemimpin yang korup dan tidak adil.

Kebebasan bersuara dalam pers

Ketika masa orde baru, kebebasan perserikatan tidak diberi ruang untuk beraspirasi. Media dikontrol ketat dan dimanipulasi, pandangan dan suara kritis terhadap rezim dibungkam (Purdey, et al., 2023: 263). Hal ini menjadikan otoriter orde baru bertahan lama dan sewenang-wenang karena tidak ada media control atau kritis. Sejak kejatuhan otoriter orba dan sekarang kita beralih ke sistem demokrasi terjadi banyak perubahan dalam kebebasan bersuara. Sekarang perserikatan diberikan ruang yang sebebaskan-bebasnya untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Na,as-nya kadang kebebasan pers ini disalah artikan yaitu sebagai media propaganda. Banyak berita sekarang ini yang menjadi media propaganda.

Propaganda adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi opini, sikap atau perilaku masyarakat agar mendukung tujuan tertentu. Ketika pers digunakan untuk propaganda, media tidak lagi menjalankan fungsinya secara obyektif dan independen melainkan alat untuk menyalurkan informasi palsu dan berpihak. Berita-berita manipulatif acapkali membuat kegoncangan dalam stabilitas negara. Dalam perspektif Agustinus dari Hippo, kebenaran adalah bagian dari tatanan ilahi yang harus dijaga. Dalam kerangka *civitas Dei*, komunikasi seharusnya diarahkan pada kebenaran dan kebaikan bersama. Ketika pers justru menjadi alat penyebaran informasi palsu, maka ia telah menyimpang dari tujuan tersebut dan jatuh ke dalam logika *civitas terrena*, di mana kebenaran dikorbankan demi kekuasaan dan kepentingan

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan tanpa orientasi pada kebenaran akan menghasilkan kekacauan moral dan sosial.

Demonstrasi berbau anarki

Demonstrasi menjadi wadah dalam emansipasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Demonstrasi menyebabkan rezim orba mundur dari tampuk pemerintahan. Para mahasiswa/mahasiswa yang dikenal dengan sebutan kelompok aktivis 98 memainkan peran penting dalam mengemansipasi kebebasan yang terkungkung dalam otoriter orba. Suara mereka membawa revolusioner atau perubahan. Aksi demonstrasi tersebut merupakan gerakan revolusioner yang berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan yang mengalami distorsi logika demokrasi. Oleh karena itu, di sini terlihat jelas bahwa peran demonstrasi bukan hanya soal konflik yang destruktif tetapi merujuk pada konflik konvensional. Aksi demonstrasi menjadi suatu aksi yang berkelanjutan dan relevan terhadap bentuk gerakan revolusioner sepanjang dekade, seperti beberapa dekade yang lalu masyarakat kembali melakukan demonstrasi. Hal ini bukan tanpa sebab melainkan bukti kecemasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas kinerja yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah melalui suara keterwakilan dalam pemilu.

Kebijakan yang dirasa tidak menguntungkan masyarakat menjadikan gelombang demonstrasi kembali mencuat. Namun yang menjadi permasalahan di sini ialah demonstrasi ini tidak lagi dijalankan secara etis untuk tujuan konflik fungsional melainkan sikap anarkis yang tidak dapat dibendung dengan membangun ide demonstrasi yang berujung pada nilai destruktif. Ini menandakan bahwa, bentuk peradaban pendidikan Indonesia saat ini berada dalam bayang-bayang kehancuran. Rasionalitas dikuasai oleh agresifitas yang tidak terkontrol. Demonstrasi yang terjadi baru-baru ini menunjukkan betapa kebebasan itu kadang menjadi ruang kebablasan. Pasalnya, demonstrasi kali ini bukan hanya menyampaikan aspirasi lewat suara kritis tetapi juga membakar dan merusak fasilitas umum (Mandang, 2023: 8). Bagi Agustinus dari Hippo, kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk bertindak semaunya, melainkan kebebasan yang terarah pada kebaikan (*ordo amoris* tata cinta yang benar). Demonstrasi yang berujung pada kekerasan menunjukkan bahwa kebebasan telah kehilangan orientasinya. Ini kembali menegaskan dominasi kota dunia, di mana emosi, amarah, dan kepentingan diri mengalahkan rasionalitas dan keadilan.

Selain kebebasan yang diperuntukan bagi masyarakat, diskonsistensi demokrasi juga terlihat cara memilih pemimpin dalam demokrasi. Dalam Sistem demokrasi acapkali pemimpin dipilih bukan atas kredibilitas atau kemampuan untuk memimpin melainkan atas kepemilikan harta atau pintar bersilat lidah dalam berpolitik. Politik seringkali digunakan sebagai ajang

untuk mencari popularitas dan mencari keuntungan atau memperkaya diri. Hal ini berimpak pada jalannya sistem ketatanegaraan pemerintahan tidak dijalankan oleh orang yang berpengetahuan melainkan oleh orang yang tidak mengerti situasi jalannya politik untuk kebaikan bersama. Situasi ini tentu sangat berbahaya, karena tanpa pemimpin yang bijak, negara akan mudah terjerumus dalam kekacauan. Ketika masyarakat mulai jenuh dengan kebebasan yang tak terkendali dan situasi menjadi kacau, mereka akan mencari seorang pemimpin kuat yang dapat memulihkan ketertiban. Namun, pemimpin tersebut kemudian dapat berubah menjadi tiran yang menindas rakyatnya. Dengan demikian, demokrasi yang awalnya menjanjikan kebebasan justru berakhir pada bentuk pemerintahan yang paling buruk, yaitu tirani.

Namun, Agustinus dari Hippo memberikan kedalaman tambahan dengan melihatnya sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Dalam *civitas terrena*, kekuasaan selalu rentan disalahgunakan karena manusia cenderung mencintai diri sendiri lebih dari kebaikan bersama. Oleh karena itu, tidak ada sistem politik yang sepenuhnya sempurna, karena semuanya dijalankan oleh manusia yang terbatas dan berdosa.

Kapitalisme dalam hubungannya dengan *civitas dei*

Dalam hubungannya dengan kapitalisme, Agustinus mengemukakan kecemanya terhadap sikap cinta diri yang berlebihan. Hal ini nyata karena prinsip kapitalisme ialah kepemilikan harta pribadi. Pemilikan harta pribadi menunjukkan keadaan cinta diri. Menurut Agustinus, akar dari kecenderungan ini adalah cinta diri (*self-love*) yang berlebihan, yang melahirkan sikap indifferen dan menjauhkan manusia dari tujuan sejatinya. Walaupun istilah “kapitalisme” belum dikenal pada zaman Agustinus, gagasan tentang pencarian kekayaan, kepemilikan pribadi, dan kesenjangan sosial telah ia bahas secara mendalam. Agustinus mengkritik keras kecenderungan manusia untuk menjadikan uang sebagai tujuan kebahagiaan serta memiliki harta benda tidak pada takaran atau berlebihan. Ia berpendapat bahwa cinta terhadap uang merupakan akar dari banyak kejahatan sosial dan politik. Orang yang terlalu mencintai harta akan kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional dan adil. Oleh karena itu, Agustinus berpendapat bahwa penguasa atau kelas penjaga negara seharusnya tidak memiliki kekayaan pribadi maupun keluarga sendiri. Mereka harus hidup bersama secara sederhana dan hanya berfokus pada kepentingan negara, bukan pada keuntungan pribadi (Mandang, 2023: 188-195).

Terkait pemikiran Agustinus ini bisa dikatakan bahwa Ia tidak setuju terhadap sistem kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi individu. Menurut Agustinus, sistem yang menjadikan kekayaan sebagai prioritas hidup membuat kekacauan

dalam masyarakat dan menghancurkan keadilan sosial. Sistem kapitalisme sering kali membawa ambiguitas yaitu penyimpangan pendapatan. Kenyataan ini melahirkan kota dunia yaitu cinta diri. Dalam masyarakat yang terobsesi dengan kekayaan, individu akan berusaha untuk menambah kantong pribadi dalam hal ini menambah pundi-pundi uang atau mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Hal ini melahirkan perbedaan pendapat yang pada akhirnya timbullah ketimpangan sosial dan menimbulkan konflik antara orang kaya dan orang miskin.

Kenyataan ini juga selaras dengan kritikan dari David Cromwell terhadap pemikiran Adam Smith terkait teori *invisible hands* “tangan tak terlihat”. Tangan tak kelihatan merujuk pada hukum alam yang mengatur segala perubahan dalam masyarakat termasuk perubahan dalam bentuk perekonomian. Latar belakang teori ini adalah sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran tentang perubahan yang cepat atau revolusioner yang hanya akan melahirkan peperangan dan kekacauan dalam masyarakat (Wadi, 2017: 46-47). Cromwell menyatakan bahwa sistem kapitalisme sebenarnya merupakan sebuah sarana yang ganas untuk mengisap habis-habisan ekonomi dan kekayaan alam orang-orang miskin di negara-negara berkembang untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini dibaluti dengan nama “investasi luar negeri” dan eksploitasi (Jebadu, 2020: 251). Demokrasi yang menganut sistem pasar bebas membuka peluang bagi para pemilik modal untuk berinvestasi. Alhasil alam yang semula menjadi sahabat dari warga terpaksa harus diratakan atau dibabat demi keuntungan para pemilik modal. Cinta diri yang tidak terarah ini membuat manusia melupakan tanggung jawabnya untuk merawat ciptaan, dan justru melihatnya sebagai objek yang perlu direvisi dan menjadi kelinci percobaan dari setiap bentuk teknologi baru di sepanjang dekade. Kondisi ini kemudian tidak hanya berdampak pada relasi manusia dengan alam, tetapi juga meluas dalam struktur sosial dan ekonomi, di mana eksploitasi terhadap alam sering kali berjalan seiring dengan ketidakadilan terhadap kelompok manusia yang lemah.

Agustinus menyatakan bahwa keterarahan manusia kepada Allah atau ke dalam kota Allah bila terjadi jika manusia mewujudkan keadilan. Hal ini Agustinus tegaskan dalam penjelasan terkait Kota Allah. Demokrasi yang awalnya mengedepankan kesejahteraan rakyat, kini diperuntukan hanya bagi segelintir orang. Kenyataan ini diperparah ketika demokrasi memberikan peluang bagi kapitalisme dengan menganut ekonomi pasar bebas. Demokrasi yang berasaskan kesetaraan pada masyarakat acapkali tidak mengenai sasaran. Artinya asas kebebasan individu hanya aturan yang digunakan kaum kapitalisme agar masuk ke dalam sebuah negara dengan paham demokrasi. Demokrasi memberi ruang bagi kaum kapitalis untuk menanamkan modal.

Dalam kerangka *civitas Dei*, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, dalam *civitas terrena*, kekayaan menjadi tujuan utama, sehingga melahirkan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Kritik modern seperti yang disampaikan oleh David Cromwell terhadap kapitalisme global memperkuat relevansi pemikiran ini, khususnya dalam konteks eksploitasi sumber daya di negara berkembang.

Relevansi *Civitas Dei* bagi Demokrasi Modern

Agustinus dari Hippo menegaskan bahwa keadilan hanya mungkin terwujud ketika setiap orang menjalankan perannya secara benar dan terarah pada kebaikan bersama. Dalam *De Civitate Dei*, ia bahkan menyatakan bahwa tanpa keadilan, negara tidak lebih dari “perampok besar” (*remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia*). Dalam konteks demokrasi modern, pernyataan ini menjadi kritik tajam. Demokrasi yang seharusnya menjamin kesejahteraan bersama justru sering dimanfaatkan oleh segelintir elit politik dan kekuatan kapital untuk menguasai sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa orientasi pada nilai-nilai *Civitas Dei* yakni cinta kepada Allah, keadilan, dan kebaikan bersama demokrasi mudah terjerumus ke dalam praktik ketidakadilan.

Dengan demikian, pemikiran *civitas Dei* tidak menolak keberadaan negara atau demokrasi, tetapi mengingatkan bahwa semua sistem duniawi selalu terbatas dan rentan terhadap penyimpangan. Harapan akan keadilan yang sempurna tidak terletak pada sistem politik, melainkan pada orientasi manusia kepada kebaikan tertinggi. Oleh karena itu, demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik sejauh para pelakunya mengarahkan diri pada nilai-nilai moral yang melampaui kepentingan pribadi.

5. KESIMPULAN

Paradigma Agustinus mengenai kota Allah dan Kota Manusia merupakan diskursus kompleks terhadap polemik seputar persoalan demokrasi. Kendatipun latar belakang penulisan buku *De Civitate Dei* tidak secara eksplisit merujuk pada konsep negara demokratis pada jaman itu, tetapi sangat relevan ketika pemikiran Agustinus ini dilakukan dengan pendekatan epistemik terhadap persoalan yang terjadi dalam sebuah negara demokratis di abad 20 ini. Artinya bahwa, pemikiran Agustinus yang tertuang dalam maha karyanya, sangat relevann terhadap setiap diskursus sepanjang jaman terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Pemikiran Agustinus dalam buku mahakaryanya itu tentang Kota Allah dan Kota Manusia sangat kaya akan daya kognitif yang dipengaruhi oleh filsafat dan teologi yang membuat kita semakin jeli melihat persoalan tatanan demokrasi dalam bentang refleksi filosofis dan teologis. Intisari dari kedua jenis kota dalam perspektif Agustinus menggambarkan dua relaitas yang

memiliki diferensiasi spesifik mengenai konsep yang relevan terkhusus tentang konsep demokrasi dan kapitalisme. Kota Allah mencerminkan sebuah negara yang dibangun di atas cinta akan Allah. Dalam hal ini, Agustinus mengidealkan sebuah negara yang tidak dipenuhi oleh ego yang mengatasi segala hal yang bersifat materi.

Sedangkan Kota Manusia mencerminkan sebuah negara yang dilandasi oleh kecintaan terhadap diri yang radikal. Setiap orang selalu berpikir untuk bersaing tanpa batas dan etika dalam memperbanyak materi dengan menenempatkan orang lain sebagai dampak dari persaingan ego. Ketegangan antara kedua jenis kota ini menjadi relitas yang tidak dapat dielakan, karena keduanya akan muncul secara bersamaan. Kenyataan ini berlanjut jika disinkronkan dengan konteks demokrasi Indonesia yang dipenuhi oleh kerakusan dan ketamakan. Demokrasi bukan lagi berada pada posisinya sebagai wadah penyaluran suara, tetapi menjadi oposisi dengan membungkam suara dari rakyat. Sistem demokrasi juga membuka ruang yang sangat lebar dengan memberikan karpet merah bagi para investor yang menanam modal dengan meraup keuntungan yang besar. Kenyataan ini menjadi ruang reflektif filosofis dan teologis dalam terang pemikiran Agustinus tentang kota Allah dan Kota Manusia, khususnya tentang ketimpangan yang sangat besar antara kaum kaya dan kaum miskin dalam persaingan ekonomi.

DAFTAR PUSATAKA

- Agustinus dari Hippo. (2003). *Kota Allah (De Civitas Dei)* (Terj. Indonesia). Kanisius.
- Alwino, A. (2018). Memahami konsep kepentingan diri menurut Agustinus dan Hobbes. *Jurnal Melintas*, 34(3). <https://doi.org/10.26593/mel.v34i3.3458.233-247>
- Arendt, H. (2006). *The origins of totalitarianism*. Harcourt. <https://doi.org/10.2307/j.ctv120qr2d.33>
- Astawa, P. A. (2015). *Materi kuliah kewarganegaraan: Demokrasi Indonesia*. Koekoesan.
- Bellah, R. N. (1992). *The broken covenant: American civil religion in time of trial* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Copleston, F. (1993). *A history of philosophy: Medieval philosophy*. Doubleday.
- Dagun, S. M. (2000). *Kamus besar ilmu pengetahuan*. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2).
- Haboddin, M., & Arjul, M. (2016). *Pengantar ilmu politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika kekuasaan: Ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. LP3ES.

- Hamson, Z. (2021). Politik uang di pemilu Indonesia: Sebuah tinjauan. *Journal of Communication Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>
- Haryatmoko. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*. Kompas.
- Hasan, Z., & Mahyudi. (2020). Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme Adam Smith. *Jurnal Istidlal*, 4(1). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Jebadu, A. (2020). *Drakula abad 21: Membongkar kejahatan sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali sebagai kapitalisme mutakhir berhukum rimba dan ancamannya terhadap sistem ekonomi Pancasila*. Ledalero.
- Jegalus, N. (2011). *Membangun kerukunan agama dari ko-eksistensi sampai pro-eksistensi*. Ledalero.
- Kleden, I. (2004). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan*. LP3ES.
- MacIntyre, A. (2007). *After virtue* (3rd ed.). University of Notre Dame Press.
- Madung, O. G. (2014). *Politik, hukum, dan agama dalam ruang publik*. Ledalero.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Mamahit, F. Y. (2000). Kota Allah: Sebuah interpretasi teologis dan filosofis terhadap sejarah. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 1(2). <https://doi.org/10.36421/veritas.v1i2.42>
- Mandang, O. A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi bersifat anarkis yang berakibat pengrusakan barang milik negara. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12(5).
- Purdey, J., dkk. (2023). *Indonesia* (M. Harifin, Trans.). Gajah Hidup.
- Rapar, J. H. (1989). *Filsafat politik Agustinus*. Rajawali.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042582>
- Suseno, F. M. (1999). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226924564.001.0001>
- Ule, S. (2011). *Terorisme global: Tinjauan, kritik dan relevansi pandangan Jean Baudrillard*. Ledalero.
- Wadi, R. (2017). *Menggugat neoliberalisme: Sebuah kritik George Soros*. Asia Media.